

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata adalah sektor yang berpotensi tinggi apabila dikembangkan karena dapat berdampak positif dalam menumbuhkan perekonomian negara atau daerah. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tepatnya pasal 1 ayat (3) dicantumkan mengenai pariwisata merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh bermacam-macam fasilitas dan juga adanya layanan yang dipersiapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha dan juga masyarakat. Pasal 6 menjelaskan mengenai pembangunan kepariwisataan dilaksanakan melalui implementasi rencana membangun pariwisata dengan adanya perhatian akan budaya dan alam yang khas, keberagaman, keunikan dan apa yang dibutuhkan masyarakat ketika melakukan wisata.

Menurut Masita dan Andi (2010), pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah bagian dari usaha membangun untuk tingkat nasional sebagai wujud untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati kekayaan yang ada di wilayah nusantara yang adalah modal dan dasar dalam mengembangkan kebudayaan bangsa. Dalam mengembangkan dan menumbuhkan pariwisata dibutuhkan perhatian sebagai bentuk antisipasi supaya pengembangan tersebut senantiasa pada jalannya dan juga daya dukungnya. Menurut Hamidi (2012) pengembangan pariwisata

adalah tindakan yang realistis dan logis karena tindakan tersebut membuat peluang usaha semakin tinggi, pendapatan masyarakat bertambah dan dorongan terhadap pemeliharaan keamanan.

Indonesia merupakan negara di dalamnya terdapat berbagai kegiatan wisata mulai dari alam, sosial dan budaya. Kegiatan wisata ini dapat dijumpai di setiap daerah bahkan pelosok Indonesia. Masing-masing mempunyai ciri khas, keunikan dan keberagaman atas wisatanya. Banyaknya kegiatan wisata menjadi menarik perhatian wisatawan, sehingga Indonesia menjadi negara tujuan wisata, salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Nomor	Tahun	Jumlah Perjalanan
1.	2019	59.838.282
2.	2020	118.895.290
3.	2021	133.341.972
4.	2022	103.991.668
5.	2023	114.358.219

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Melalui tabel 1.1 diperoleh informasi mengenai kuantitas wisatawan dalam lima tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yaitu tahun 2019 sebanyak 59.838.282 perjalanan wisatawan, tahun 2020 sebanyak 118.895.290 perjalanan wisatawan dengan presentase sebesar 98,69% artinya perjalanan wisatawan dari tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2021 sebanyak 133.141.972 perjalanan wisatawan dengan presentase 12,15% dan tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 103.991.668 perjalanan wisatawan dengan presentase -22,01%. Selanjutnya, tahun 2023 sebanyak 114.358.219 perjalanan wisatawan dengan presentase 9,96%.

Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 mencantumkan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah sejalan dengan wewenang, masyarakat dan lingkungan bisnis dengan terpadu. Melalui peraturan tersebut setiap pemerintah daerah berusaha mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya. Berikut ini adalah tabel wisatawan nusantara di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023

Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan Nusantara di Kota Semarang Tahun 2019-2023

Nomor	Tahun	Jumlah Wisatawan ¹
1.	2019	7.150.343
2.	2020	3.260.303
3.	2021	2.670.281
4.	2022	5.338.233
5.	2023	6.470.037

Sumber: Buku Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Semarang tahun 2019 memiliki jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 7.150.343 wisatawan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi sebanyak 3.260.303 wisatawan dengan presentase -54,40%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi 2.670.281 wisatawan dengan presentase sebesar -18,09% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 5.338.233 wisatawan dengan presentase sebesar 99,91%. Selanjutnya, tahun 2023 meningkat menjadi 6.470.037 wisatawan dengan presentase sebesar 21,20%.

Kota Semarang adalah suatu kota di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah yang mempunyai kawasan sejarah potensial disebut Kota Lama Semarang. Kawasan tersebut diberi julukan sebagai “*Little Netherland*” sebab berdasarkan historisnya kota tersebut adalah pusat kota klasik yang dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan dengan gaya Eropa oleh Belanda (Pratiwo, 2004). Pada masa tersebut, Kota Lama berperan penting terhadap berkembangnya Kota Semarang. Tahun 2015 Kota Lama Semarang masuk dalam “*tentative list*” UNESCO sebagai nominasi daerah yang memiliki peluang menjadi Warisan Dunia Tahun 2020 dengan tujuan wisata tingkat internasional. Bangunan bersejarah yang hingga ini ada di Kota Lama diantaranya adalah Gereja GPIB Immanuel, Stasiun Tawang, Jembatan Berok, Gedung Marabunta, bangunan Pabrik Rokok “Praoe Layar” dan sebagainya.

Tabel 1.3 Jumlah Wisatawan Nusantara di Kota Lama Semarang

Tahun 2020-2023

Nomor	Tahun	Jumlah Wisatawan
1.	2020	1.186.672
2.	2021	615.768
3.	2023	2.658.103

Sumber: Buku Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa wisawatan nusantara di Kota Lama Semarang mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Buku Pariwisata Jawa Tengah tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah wisatawan Kota Lama dan Lawang Sewu digabung yaitu sebanyak 3.024.536 yang mengalami penurunan dari 1.430.683 tahun 2018 yang kemudian pada tahun 2020 dilakukan pendataan terpisah dimana jumlah wisawatan di tahun 2020 sebanyak 1.186.672 wisawatan menurun drastis pada tahun 2021 menjadi 615.768 wisatawan dengan presentase sebesar -4,81%. Tahun 2022 jumlahnya tidak diketahui karena data mengenai jumlah wisatawan di Kota Lama Semarang tidak dapat diakses. Pada tahun 2023 menjadi sebanyak 2.658.103 wisatawan.

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang dilakukan sesuai Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah

memiliki hak dalam mengatur dan mengelola urusan pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Kota Semarang membentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Namun, khusus untuk Kota Lama Semarang, pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) Semarang. Badan ini dikukuhkan pada Kamis, 13 Juni 2024.

Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) berperan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kota Lama Semarang. Salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan adalah program revitalisasi Kota Lama. Namun, penyediaan sarana dan prasarana dalam program tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya fasilitas publik, seperti toilet, tempat pembuangan sampah, bangku duduk, serta penerangan yang tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan wisatawan merasa kurang nyaman saat berkunjung.

Program revitalisasi Kota Lama Semarang oleh Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang juga dilakukan dengan pengadaan relokasi pedagang kaki lima. Sejak penetapan Kota Lama pada tahun 2020 menjadi cagar budaya dan merupakan objek wisata, kuantitas pengunjung dan pedagang kaki lima semakin bertambah yang berdampak pada Kota Lama terlihat sebagai wilayah yang kumuh. Hal ini terjadi karena pedagang kaki lima berjualan dengan memanfaatkan fasilitas umum dan menyebabkan kemacetan sehingga Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang melakukan program revitalisasi dengan

merelokasi pedagang kaki lima ke dalam bangunan bersejarah. Faktanya, realisasi program revitalisasi ini tidak berjalan efektif. Banyak pedagang kaki lima merasa kurang puas dengan fasilitas yang disediakan pemerintah. Relokasi yang dilakukan dinilai tidak tepat sasaran karena lokasi baru jauh dari pusat keramaian. Selain itu, luas lahan yang diberikan untuk setiap pedagang hanya 2 meter, sehingga tidak cukup untuk menampung seluruh barang dagangan para pedagang kaki lima di Kota Lama.

Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan program kerja manajemen pengelolaan. Salah satu programnya adalah program penataan ruang Kota Lama Semarang yang di dalamnya terdapat penataan lahan yaitu jalur jalan dibentuk untuk menjadi jalur pejalan kaki. Penataan lahan ini berdampak pada adanya larangan kendaraan bermotor melintas di jalur pejalan kaki tersebut, terlebih pada saat pelaksanaan acara tertentu, arus lalu lintas diubah untuk memberikan keleluasaan pejalan kaki. Faktanya, lahan parkir yang disediakan di kawasan tersebut kurang mencukupi, kurang ditata dan kurang dikelola oleh Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang sehingga muncul parkir liar yang mengganggu kegiatan wisata dan pergerakan di tempat tersebut.

Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang juga menunjukkan perannya dalam hal menyediakan fasilitas untuk masyarakat penyandang disabilitas (difabel). Peran ini penting dilaksanakan sebagai langkah untuk menciptakan ruang yang adil bagi publik dan sejumlah pedestrian telah

menyediakan jalan bagi tuna netra. Faktanya, kondisi penataan kawasan tersebut dan aksesibilitasnya kurang mencukupi bagi warga difabel. Kelompok penggiat difabel di kawasan tersebut menemukan fakta bahwa sejumlah fasilitas belum dapat dimanfaatkan oleh warga yang memiliki cacat. Misalnya, adanya ruang yang terlalu sempit antara tiang-tiang kecil di sepanjang trotoar dan dapat menghambat jalannya pengguna kursi roda. Selain itu, tidak ada informasi berbentuk visual untuk tuna rungu maupun tuna netra karena hal tersebut membuat mereka tidak mengerti dan tidak mengetahui informasi Kota Lama.

Permasalahan peran Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang lainnya adalah tidak menyediakan informasi berbentuk visual di gedung-gedung bersejarah di Kota Lama. Buktinya adalah wisatawan yang mengalami kesulitan memperoleh informasi yang jelas dan akhirnya nilai sejarah dari situs tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada wisatawan dan tujuan dari keberadaan Situs Kota Lama menjadi cagar budaya tidak dapat diwujudkan. Tujuan dari cagar budaya tersebut adalah sebagai tempat wisata untuk mendapatkan informasi mengenai budaya dan sejarah dari peristiwa di masa lalu. Dalam Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama mencantumkan bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas dalam melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan Situs Kota Lama. Tepatnya, pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwa tugas dari pemerintah daerah adalah penyediaan informasi Situs Kota Lama kepada masyarakat. Artinya, Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang

dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama yang merupakan cagar budaya tidak direalisasikan sesuai isi dari peraturan pemerintah.

Menurut Blakely (1989), pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata berperan sebagai fasilitator ditandai dengan pemerintah memfasilitasi kegiatan masyarakat yang sesuai dengan pengembangan objek wisata sehingga keberlangsungan dalam mengembangkan wisata berlangsung dengan lancar. Dalam Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 pasal 11 ayat (5) dijelaskan bahwa salah satu strategi dalam merealisasikan kebijakan pemanfaatan di Situs Kota Lama yaitu penyediaan tempat untuk kegiatan sosial, perekonomian dan juga kebudayaan. Faktanya, becak sebagai transportasi yang sering dijumpai di kota tersebut dilarang mangkal karena dinilai sebagai sumber kemacetan. Hal tersebut juga terjadi karena jalan di kawasan tersebut semakin sempit akibat adanya pembatas jalan dan lampu jalan yang dipasang di lokasi tersebut yang merupakan jatah atas kegiatan revitalisasi dan orang-orang yang bekerja sebagai tukang becak sering disidak oleh Satpol PP akibat mereka mangkal di kawasan tersebut.

Pemerintah merencanakan bahwa becak akan dimanfaatkan dan merupakan pilihan wisatawan untuk mengelilingi Kota Lama sehingga memberikan perjalanan wisata baru bagi wisatawan. Harapan pemerintah terhadap becak wisata tersebut adalah menjadi *local guide* supaya mempermudah pemberian penjelasan mengenai informasi Kota Lama dengan memberikan buku panduan wisata dan kemudian mereka menjadi pemandu

wisata yang mampu dan berdampak dalam pengembangan wisata di Kota Lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum diberdayakan oleh Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang di Kota Lama Semarang dan menjadi bukti bahwa pemerintah daerah kurang maksimal dalam melakukan koordinasi.

Masalah peran lainnya adalah tidak adanya regulasi yang mengatur harga lahan di Kota Lama yang berdampak pada kawasan tersebut mempunyai memiliki harga lahan yang beragam dan juga nilainya dominan tinggi. Sebelum dan sesudah adanya revitalisasi sekitar 87,5% harga lahan per bangunan dominan konstan. Presentase harga yang mengalami kenaikan ataupun penurunan setelah revitalisasi kawasan kira-kira 12,5%. Contohnya, Kantor Jiwasraya terjadi peningkatan 100% dari harga sebelumnya dan Hero Coffee Indonesia mengalami penurunan harga dari sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan pada adanya pengaruh kondisi harga lahan terhadap pola ruang yaitu kawasan yang harganya naik mempunyai pemanfaatan untuk kawasan yang komersial. Harga lahan ini juga berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan di atasnya. Tingginya harga lahan di kawasan Kota Lama berdampak pada adanya gedung-gedung bersejarah yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal sebagai wisata budaya.

Salah satu peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata adalah sebagai motivator (Blakely, 1998) diwujudkan melalui promosi, baik promosi produk masyarakat maupun objek wisata di Kota Lama. Contohnya

adalah pendirian Galeri Industri Kreatif di Kota Lama Semarang. Galeri ini menjadi wadah bagi pelaku Industri Kreatif Mandiri (IKM) di Jawa Tengah untuk memamerkan karya mereka yang inovatif, berkualitas unggul, dan memiliki desain yang beragam. Namun, perusahaan-perusahaan di bidang ekonomi kreatif yang masuk ke kawasan Kota Lama Semarang masih minim. Buktinya adalah keberadaan subsektor industri kreatif di Galeri Industri Kreatif hanya terdapat 16 sektor yang menunjukkan bahwa keseluruhan subsektor industri kreatif belum terdapat di Galeri tersebut. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan yang rendah, fasilitas galeri yang belum lengkap, promosi yang masih kurang aktif dilakukan dan spot foto yang tersedia kurang menarik. Sementara, Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang memiliki tugas dan fungsi mengenai kegiatan untuk promosi objek wisata Kota Lama Semarang.

Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) Semarang memiliki peran penting dalam pengembangan objek wisata Kota Lama Semarang. Semua peraturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pengembangan pariwisata harus dilakukan secara terencana dan menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. BPSKL Semarang berperan penting dalam kegiatan pariwisata di Kota Lama Semarang sesuai dengan yang dicantumkan dalam peraturan yang berlaku dan melibatkan banyak pihak baik, masyarakat,

dunia bisnis, pemerintah setingkat ataupun pemerintah di atasnya. Meskipun demikian, peran BPSKL tersebut tidak sepenuhnya dilakukan alasannya dapat diperhatikan melalui fakta mengenai permasalahan yang ada di Kota Lama Semarang. Berdasarkan permasalahan atas kenyataan yang terjadi di kawasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang dalam Pengembangan Objek Wisata di Kota Lama Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan di atas dapat dirumuskan menjadi dua rumusan masalah untuk penelitian ini. Rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana peran Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) Semarang dalam pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) Semarang dalam melakukan perannya untuk mengembangkan wisata Kota Lama Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitiannya adalah

1. Untuk menganalisis peran Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) Semarang dalam pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang.

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) Semarang dalam melakukan perannya untuk mengembangkan objek wisata di Kota Lama Semarang.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Sedangkan, manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang memuat pemikiran ilmiah dan kajian-kajian mengenai peran pemerintah daerah yaitu Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) Semarang dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang dan juga sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang memiliki penelitian berhubungan dengan peran dalam pengembangan objek wisata oleh pemerintah.

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi Peneliti

Harapan peneliti adalah agar ilmu pengetahuan yang diperoleh dari aktivitas pembelajaran selama periode perkuliahan mampu diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga semakin terampil dalam kegiatan penelitian.

2) Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini menjadi salah satu bahan acuan atau bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan perannya untuk mengembangkan objek wisata .

3) Bagi Pembaca

Melalui adanya penelitian ini, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai peran Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti memerlukan dasar yang dijadikan sebagai pedoman atau sebagai acuan yang bentuknya berupa teori-teori atau temuan yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti dalam mendapatkan perbandingan dan kemudian untuk memperoleh pandangan baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian terdahulu merupakan sebuah bantuan kepada peneliti dalam dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan keaslian dari penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnawati tentang *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rantau Bais Kecamatan*

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir (Isnawati., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata pulau tilan dan pengembangan wisata pulau tilan dan mengetahui faktor yang menghambat pengembangan objek wisata Pulau Tilan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teori dari Pitana dan Gayatri (2005) mengenai peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata sebagai dinamisator, motivator dan fasilitator. Untuk hasilnya adalah berdasarkan analisis dengan teori Pitana dan Gayatri (2005), Pemerintah Desa dalam perannya untuk mengembangkan objek Wisata Pulau Tilan belum dilakukan dengan maksimal. Terdapat faktor penghambat peran yaitu kurangnya modal, SDM yang rendah, dan masih minimnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan objek wisata. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu lokus berada di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan teori dari Pitana dan Gayatri.

Penelitian dengan menggunakan teori dari Pitana dan Gayatri juga ada dalam jurnal tentang *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Bernah De Vallei di Desa Kembangbelor Kabupaten Mojokerto* (Putri et al., 2023). Hasil penelitian ini adalah Peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata telah diterapkan tetapi kurang maksimal sebagai fasilitator, dan dinamistator. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya layanan yang diberikan kepada wisatawan akibat dari rendahnya kualitas SDM. Untuk lokusnya adalah Bernah De Vallei di Desa Kembangbelor Kabupaten

Mojokerto. Sedangkan, tujuannya adalah menguraikan peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata pulau tilan dan mengetahui faktor yang menghambat pengembangan objek wisata Pulau Tilan.

Penelitian yang dilakukan Desmayanti tentang *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas* (Desmayati et al., 2021). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pantai Padang Melang dengan menggunakan teori Blakely (Mudrajad Kuncoro, 2004: 113-114) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengembangkan pariwisata daerahnya sebagai koordinator, stimulator, dan fasilitator. Hasil penelitian ini adalah peran Pemda sudah dijalankan dalam mengembangkan Pantai Padang Melang namun masih belum maksimal. Kendala yang dihadapi adalah masalah penarikan investor untuk melakukan investasi dalam dunia usaha, kuantitas angkutan jalur laut yang minim, belum mencukupinya fasilitas, fasilitas yang belum dirawat dan belum dioperasikan dengan tepat, dan pengawasan dari Dinas Pariwisata masih terbilang lemah.

Penelitian yang menggunakan Teori Pitana dan Gayatri (2005) juga ada dilakukan oleh Nurjanah tentang *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Bokori Kabupaten Konawe* (Nurjanah., 2019). Adapun tujuannya adalah menguraikan peran pemerintah daerah dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengembangkan objek wisata di

Pulau Bokori dengan menggunakan teori Pitana dan Gayatri mengenai peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata sebagai dinamisor, motivator dan fasilitator. Hasil penelitian ini adalah dalam mengembangkan objek wisata di Pulau Bokori, peran Pemda adalah motivator, pengoptimalan penyelenggaraan atraksi wisata seperti voli pantai level nasional; fasilitator, pembangunan fasilitas sesuai dengan yang dibutuhkan seperti villa ; dan dinamisor, adanya dengan sinergi dengan dinas lain dan masyarakat. Kendalanya adalah masyarakat kurang menyadari kegunaan pariwisata.

Penelitian tentang *Peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lasiana di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur* (Mulyana et al., 2022) menggunakan teori Biddle dan Thomas dalam Horoeopetri dan Santosa (2003) bahwa terdapat beberapa dimensi peran antara lain sebagai kebijakan, alat komunikasi, strategi, alat penyelesaian sengketa dan terapi. Hasil penelitian adalah peran telah dilakukan sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa dan terapi. Kendalanya yaitu kurangnya kegiatan promosi dan masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat tentang *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya* (Hidayat et al., 2020) berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori dari Siagian (2018:142-150) peran pemerintah meliputi: stabilisor, inovator, modernisor, pelopor dan pelaksana sendiri. Hasilnya

adalah peran pemerintah Desa dilakukan dengan menata lokasi bersamaan dengan beragamnya fasilitas dan memperbaharui infrastruktur. Faktor pendukung pengembangan potensi wisata yaitu regulasi yang mendukung, bantuan pemerintah dan SDA. Faktor penghambat yaitu daya dukung yang kurang, rendahnya SDM serta tindakan perangkat serta warga yang masih rendah. Tujuan penelitiannya adalah menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan peran kelembagaanya.

Penelitian dengan teori yang sama dari sebelumnya yaitu teori dari Siagian dilakukan oleh Hasim tentang *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach pada Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor* (Hasim et al., 2019). Tujuannya adalah mengetahui Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach pada Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Peran pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata Yendi mayoritas sebagai motivator daripada fasilitator maupun dinamisator.

Penelitian yang dilakukan Djaafar tentang *The role of the government in the management of tourism object development of Kurenai Beach Botubarani Village, Kabila Bone Bone Bolango Regency* (Djaafar et al., 2022) berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dari pemerintah dalam pengelolaan pengembangan objek Pariwisata Pantai Kurenai juga sebagai faktor penghambat dalam pengembangan Pariwisata objek Pantai Kurenai di Desa Botubarani Kabila Bone Kabupaten

Tulang Bolango. Teorinya adalah Bakaruddin (2009) faktor penentu dalam melaksanakan peran pemerintah terkait pengurusan izin tempat wisata yaitu pengaturan wisata dan pengembangan atraksi wisata. Hasil penelitian yaitu peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata Pantai Kurenai Desa belum maksimal karena tiket masuk/retribusi yang disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan. Faktor penghambat adalah belum sepenuhnya terjalin kerjasama antar masyarakat dan pemerintah daerah, serta belum adanya sistem digital, yaitu konten website yang dibuat khusus untuk mempromosikan objek wisata Pantai Kurenai sendiri.

Penelitian dengan teori yang sama dengan Desmayati dilakukan oleh Sholihah tentang *The Role of Village Government in the Development of Tourism Villages in Tempos Village West Lombok Regency Indonesia* (Sholihah et al., 2022). Tujuannya adalah mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata di Desa Tempos dan mengetahui faktor penghambat pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata dan teori Blakely (dalam Kuncoro, 2004) peran pemerintah desa menjadi empat yaitu wirausaha, koordinator, stimulator dan fasilitator. Hasilnya adalah Peran pemerintah yaitu sebagai wirausaha, melaksanakan penggunaan lahan untuk kuliner dan tempat berdagang secara bebas, pelaksanaan koordinasi rencana membangun wisata bersama Pokdarwis, memberikan dukungan dan pembuatan anggaran operasional 30 juta/tahun dan mengajak untuk menanam modal.

Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Pratiwi tentang *The Role of Government Tourism Office in The Development Of Tourism Objects of Cipogas Lake Rokan Hulu* (Pratiwi., 2020). Tujuan penelitian ini adalah menentukan peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan obyek wisata Danau Cipogas Rokan Hulu dan teori Pitana dan Gayatri (2005:95) peran pemerintah daerah sebagai dinamisator, motivator dan fasilitator. Hasilnya adalah peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata Danau Cipogas adalah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamator untuk mengembangkan obyek wisata Danau Cipogas dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Perbedaan penelitian terhadap penelitian sebelumnya, teori yang digunakan adalah teori peran yang digunakan dalam pengembangan objek wisata dari Blakely. Peran pemerintah tersebut adalah peran sebagai koordinator, fasilitator, stimulator dan motivator. Dalam penelitian sebelumnya teori ini juga digunakan tetapi berbeda dengan penelitian ini karena meskipun teorinya sama terdapat perbedaan pada sub fenomena yang digunakan dari masing-masing peran tersebut. Teori dalam penelitian ini juga menggunakan keempat peran yang dimiliki pemerintah berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan tiga peran dari keempat peran yang dikemukakan oleh Blakely. Perbedaan lainnya adalah lokus penelitian yaitu Kota Lama Semarang merupakan tempat wisata budaya terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dalam penelitian ini pemerintah yang

dijadikan subjek penelitian adalah lembaga non struktur yaitu BPSKL Semarang atau Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang.

Penelitian terdahulu menggunakan teori dari

1. Teori dari Pitana dan Gayatri (2005) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata ada tiga yaitu dinamisator, motivator dan fasilitator.
2. Teori peran dari Bakaruddin (2009) yang menjelaskan bahwa faktor penentu dalam melaksanakan peran pemerintah terkait pengurusan izin tempat wisata yaitu pengaturan wisata dan pengembangan atraksi wisata.
3. Teori peran dari Siagian (2018:142-150) meliputi: stabilisator, inovator, modernisator, dan pelaksana sendiri dan pelopor.
4. Teori dari Biddle dan Thomas dalam Horoepoetri dan Santosa (2003) bahwa terdapat beberapa dimensi peran antara lain seagai kebijakan, alat komunikasi, strategi, alat penyelesaian sengketa dan terapi.
5. Teori peran dari Blakely (Mudrajad Kuncoro, 2004: 113-114) peran sebagai koordinator, stimulator, dan fasilitator.

Penggunaan teori Blakely dalam penelitian ini atas dasar menjadikan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya yaitu menggunakan 4 peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata. Penelitian ini menggunakan 4 peran tersebut untuk analisis peran BPSKL

dalam pengembangan objek wisata Kota Lama Semarang. Selain itu, teori ini sesuai dengan masalah-masalah yang ada di latar belakang sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut A. Dunsire dalam Donovan dan Jackson (1991: 9) menjelaskan mengenai keberagaman batas "administrasi". Menurut Dunsire, definisi administrasi, adalah sebagai kegiatan implementasi, kegiatan pengarah, kegiatan menganalisis, membuat keseimbangan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan kebijakan yang merupakan kerja. Pendapat lain adalah dari Harbani Pasolong (2010:8) yang mengemukakan bahwa administrasi publik adalah sekelompok manusia atau instansi yang bekerja sama dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah sebagai langkah untuk dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat umum yang terpenuhi dengan efektif dan efisien. Sedangkan, menurut Nicholas dalam Harbani Pasolong (2010 :8), definisi dari administrasi publik yaitu suatu percampuran kompleks teori dan praktek yang bertujuan untuk memberikan pengertian bagi pemerintah mengenai korelasi pemerintah terhadap dan membuat dorongan agar kebijakan publik lebih tanggap untuk kebutuhan publik mendorong kebijakan publik.

Menurut Yermias T. Keban, ruang lingkup Administrasi Publik dicirikan sebagai berikut:

1. Dimensi Kebijakan, berkaitan dengan keputusan yang dilaksanakan dikerjakan. Keberadaan dimensi tersebut sangat berpengaruh karena posisinya menentukan mengenai hal yang dilaksanakan.
2. Dimensi Manajemen, berkaitan dengan penerapan prinsip manajemen untuk melakukan kebijakan publik. Dimensi ini berpusat cara melaksanakan keputusan sesuai prinsip manajemen.
3. Dimensi Organisasi, berkaitan dengan pelaku yang melaksanakan keputusan. Aspek pertama adalah klasifikasi tugas, fungsi dan tanggung jawab. Aspek kedua adalah kemampuan dalam melaksanakan. Aspek yang ketiga adalah keseimbangan otoritas dalam pelaksanaan tugas terhadap kemampuan dalam pelaksanaan tugas yang ditentukan
4. Dimensi Etika, dimensi yang dimana etika sebagai tuntunan moral oleh administrator untuk melakukan tugas dan fungsinya. Dimensi ini memiliki peran penting dalam keberlangsungan organisasi begitu juga dengan kehidupan. Pelaksanaan dimensi ini dapat diamati melalui kode etik dalam pemerintahan.
5. Dimensi Lingkungan, artinya adalah kondisi yang memberikan pengaruh terhadap keseluruhan dimensi dalam administrasi publik. Lingkungan didefinisikan sebagai seluruh faktor yang bukan bagian organisasi. Dalam dimensi ini mencakup lingkungan umum (kebudayaan, perekonomian, sosial, dan sebagainya) dan khusus (pelanggan, pemasok, pesaing, dan lain-lain).

6. Dimensi Kinerja, bukti atas pengerjaan tugas dan fungsi oleh pemerintah. Faktanya, pengukuran atas kinerja pemerintah jarang dilaksanakan, sementara untuk mengukur kinerja pegawai berpedoman Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Dari beberapa pendapat mengenai definisi administrasi publik, maka peneliti mendefinisikan bahwa administrasi publik merupakan sekumpulan manusia yang saling bekerjasama dalam organisasi pemerintah untuk mewujudkan tujuannya, memecahkan masalah di lingkungan publik dan mengatur urusan masyarakat umum.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Dalam perkembangan administrasi publik, beberapa kali tercatat sebuah fenomena krisis (anomalies). Berkembangnya ilmu administrasi berdampak pada berkembangnya perspektif administrasi publik. Lebih jelasnya, Nicholas Henry (Keban, 2014:31-33) menjelaskan terdapat lima kali pergantian paradigma administrasi publik

Paradigma 1 yaitu tahun 1900-1926 menjelaskan hubungan administrasi dan politik. Orang yang berkontribusi dalam paradigma ini yaitu Frank J Goodnow dan Leonard D.White. Menurut Leonard D. White, efektifnya eksistensi administrasi publik terjadi ketika diintegrasikan di tengah-tengah ilmu pemerintahan dan ilmu pemerintahan. Lokus paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan, namun paradigma ini tidak membahas fokus secara mendetail.

Paradigma 2 tahun 1927-1937 disebut paradigma Prinsip – Prinsip Administrasi. Tokohnya adalah Willoghby, Gullick & Urwick. Prinsip administrasi di dalam paradigma ini adalah POSDCORB yaitu planning/ perencanaan, organizing/ pengorganisasian, staffing/ penyusunan personalia, directing /pengarahan, coordinating/ pengkoordinasian, reporting/ penyusunan laporan dan budgeting/ penganggaran yang diterapkan secara bebas dan umum. Di dalam paradigma ini, lokus tidak dibahas dengan jelas dan untuk focus sifatnya umum, utamanya dilakukam di organisasi pemerintah. Kesimpulannya adalah penekanan fokus dalam paradigm ini lebih jelas daripada lokusnya.

Paradigma 3 tahun 1950-1970 yaitu Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Morstein-Marx adalah editor buku dimana dalam buku tahun 1946 yang berjudul “Elements of Public Administration” mempermasalahkan mengenai topik logisnya pemisahan politik dengan administrasi. Sedangkan, Herbert Simon mengemukakan pendapatnya mengenai tidak konsistennya prinsip dari administrasi dan prinsip administrasi universalnya tidak berlaku secara merata. Paradigma ini menunjukkan bahwa adminitrasi negara tidak dapat berlaku atau diterapkan di berbagai tempat akan tetapi disesuaikan oleh nilai-nilai tertentu. Akhirnya, muncul pandangan mengenai *value-free administration* dan *value-laden politics*. Dampaknya adalah lahir paradigm baru yaitu paradigm yang memberikan anggapan mengenai adminitrasi publik adalah bagaian dari ilmu politik dengan lokus yaitu birokrasi pemerintahan sementara untuk fokusnya

masih samar-samar karena adanya penilaian terhadap lemahnya prinsip administrasi.

Paradigma 4 tahun 1956-1970 yaitu administrasi publik sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma ini terdapat pengembangan secara mendalam terhadap prinsip-prinsip manajemen sebelumnya. Fokusnya yaitu organisasi dengan perilakunya, manajemen dengan analisisnya, sistem dengan analisisnya, dan teknologi modern dengan penerapannya serta lain sebagainya. Terdapat 2 arah pengembangan dimana yang satu berpusat pada pengembangan ilmu administrasi murni dengan perolehan dukungan dari psikologi sosial dan yang satu lagi berpusat pada kebijakan publik. Pengembangan tersebut diterapkan pada semua lingkungan baik dunia bisnis dan untuk administrasi publik yang kemudian berdampak pada tidak adanya kejelasan mengenai lokus administrasi publik.

Paradigma 5 tahun 1970 yaitu Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Terdapat kejelasan mengenai fokus beserta lokus administrasi publik. Fokus yang dimaksud adalah organisasi dengan teorinya, manajemen bersama teorinya, dan kebijakan untuk publik. Sedangkan untuk lokus adalah permasalahan beserta kebutuhan masyarakat.

Paradigma 6 yaitu Governance. Governance melingkupi pembahasan tentang desentralisasi atau dikenal dengan adanya pembagian kekuasaan dan fungsi. Gibson mengungkapkan bahwa intinya, governance melakukan kerja

sama untuk melakukan fungsi dalam birokrasi. Dalam kerja sama terdapat sektor publik, swasta, masyarakat dan organisasi (Ikeanyibe, 2017). Paradigma ini memuat bahwa semua urusan dalam pemerintahan baik politik, ekonomi, dan yang lainnya dikelola melalui pengadaan interaksi atau hubungan antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Hubungan administrasi publik ini terhadap masalah-masalah tersebut, menurut Islamy (2007:10) berkaitan dengan seberapa besar pengaruh negara adalah kepentingan publik.

Penelitian ini termasuk dalam paradigma 5 tahun 1970 yaitu Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik karena dalam paradigma ini terdapat fokus yaitu organisasi dengan teorinya. Organisasinya adalah organisasi publik yaitu Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang (BPSKL). Organisasi ini adalah lembaga non struktural yang dibentuk sendiri oleh Pemerintah Wali Kota Semarang. Lembaga ini dibentuk untuk mengelola Kota Lama Semarang. Dalam penelitian ini yang dibahas mengenai peran dari organisasi atau BPSKL Semarang dalam pengembangan objek wisata. Untuk lokusnya adalah kebutuhan masyarakat dan permasalahan yaitu pengembangan objek wisata.

1.5.4 Organisasi Publik

Menurut Shafriz dan Russel (1997: 201), organisasi adalah sekelompok manusia yang bekerja sama untuk mewujudkan guna tujuan yang ditetapkan. Definisi ini memberikan pengertian mengenai pengelompokan orang-orang untuk mengadakan kerja sama dimana pengelompokan tersebut dilakukan atas

dasar pembagian kerja, peran, fungsi, aturan, tanggung jawab maupun otoritas tertentu.

Menurut Sulistyani (2009:55), organisasi publik adalah instansi pemerintah yang mempunyai dasar hukum formal dan mendapatkan fasilitas dari negara dengan tujuan untuk melaksanakan kebutuhan rakyat yang kompleks. Menurut Mahmudi (2011), organisasi publik sebagai lembaga bertujuan dalam rangka melayani masyarakat dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Mahsun (2006:14) mendefinisikan organisasi publik adalah organisasi berkaitan terhadap kebutuhan masyarakat dan menyediakan barang dan jasa kepada umum yang pembayarannya berasal dari pajak atau pemasukan negara sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa definisi organisasi publik menurut peneliti adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kebutuhan umum yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

1.5.5 Peran

Dalam organisasi publik, aktor harus menunjukkan tindakan yang sejalan dengan peran yang dipunyainya. Artinya adalah dalam organisasi publik, peran sangat diperlukan dimana peran tersebut dapat diperhatikan melalui tindakan yang dilaksanakan setiap aktor yang terlibat. Ketika aktor berada pada lingkup organisasi, ada status yang dimiliki dan juga peran yang harus dilakukan berdasarkan status tersebut. Dalam setiap organisasi publik aktor

memiliki posisi yang sangat strategis yang menunjukkan bahwa aktor tersebut memiliki perannya masing-masing dalam setiap kegiatan organisasi publik.

Dari sudut pandang etimologi, peran merupakan tingkah yang harapannya dapat sesuai dengan kedudukan atau posisi di tengah umum, sedangkan dari sisi terminologi peran adalah perilaku yang sejalan dengan status yang didapatnya dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, definisi peran adalah kedudukan yang dinamis dimana peran dijalankan ketika hak dan kewajiban dilakukan dengan sesuai atau sejalan. Status artinya kumpulan hak dan kewajiban seseorang. Suatu fungsi dijalankan ketika hak dan kewajiban dilaksanakan berdasarkan kedudukan dalam masyarakat. Sama halnya, pendapat Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2013:213) menjelaskan bahwa dalam jabatan pasti ada peran dan dalam peran pasti ada jabatan.

Pendapat lain yaitu Riyadi (2002:138), definisi peran sebagai adaptasi dan gagasan yang dilakukan seseorang dalam posisi bermasyarakat. Menurut Abdulsyani, peran artinya kelakuan melalui cara tertentu sebagai upaya untuk melakukan hak dan kewajibannya berdasarkan statusnya. Pendapat lainnya yaitu dari Poerwodarminta (1995: 571), peran adalah tindakan yang dijalankan oleh setiap orang terhadap sebuah kejadian.

Dalam hal ini definisi peran menurut peneliti adalah tindakan seseorang atau kelompok yang ditunjukkan melalui adanya pelaksanaan atas hak dan kewajiban berdasarkan kedudukannya di lingkungan masyarakat.

1.5.6 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2009 mengenai Kepariwisata, mencantumkan bahwa Pemerintah baik pusat ataupun daerah mempunyai wewenang dalam pengaturan dan pengelolaan urusan kepariwisataan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan roda pemerintahan pusat dan daerah memiliki dinas daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang didasarkan pada bidangnya. Keberadaan dinas tersebut dicantumkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tepatnya pasal 24 terkait Otonomi Daerah. Untuk melaksanakan birokrasi, oleh pemerintah dibentuk lembaga non-struktural untuk menyelesaikan masalah tertentu atau membantu tugas dari kementrian. LNS adalah lembaga yang sifatnya mandiri atau independen yang mempunyai otonomi untuk melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Lembaga non struktural yang dibentuk di Kota Lama Semarang adalah Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang yang dibentuk dan ditetapkan dalam Perwal Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024.

Menurut Bakely (1989: 78-81) dalam Mudrajat Kuncoro (200:113-114) mengemukakan mengenai peran dari pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata daerah adalah

a. Peran sebagai koordinator

Menurut Blakely, peran sebagai koordinator adalah peran dengan adanya penetapan kebijakan dan merekomendasikan program untuk membangun daerahnya. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah harus mampu merangkul setiap lapisan masyarakat karena merupakan bagian dari faktor utama untuk mengembangkan objek wisata. Peran sebagai koordinator adalah untuk mengkoordinasikan semua kegiatan dalam daerah dan juga membuat perencanaan perubahan dalam membangun daerahnya. Melalui pengadaan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain dalam rangka mewujudkan tujuan yang sudah disepakati. (Amando Soares et.al, 2015)

Peran ini menunjukkan pemerintah sebagai pengkoordinasi dan pelaksana asosiasi dalam aspek pariwisata. Selain itu, pemerintah juga sebagai penyelenggara kepariwisataan untuk tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sebagai koordinator, pemerintah daerah dapat mengikutsertakan instansi pemerintah, dunia usaha dan juga masyarakat untuk menyusun target ekonomi, perencanaan dan juga strategi dalam pmengembangkan objek wisata.

Nugraha dan Enga (2021) dalam jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Studi Kasus di Pantai

Oetune, Kabupaten Timor Tengah Selatan” menjelaskan bahwa peran koordinator dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi pada berbagai pihak untuk pengembangan objek wisata. Tindakan lainnya adalah melakukan perencanaan dan fungsi manajerial dalam pembuatan system koordinasi terhadap semua sektor dalam pariwisata. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah dapat dijadikan sebuah gambaran atas pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti contohnya perencanaan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha ataupun pemerintah. Pemerintah daerah berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan pengembangan objek wisata, memonitoring kegiatan wisata dan mengevaluasi kegiatan pengembangan objek wisata di daerahnya.

Sesuai dengan pendapat di atas, dalam penelitian ini dapat dikatakan peran sebagai koordinator adalah peran pemerintah selaku penyelenggara pariwisata dalam mengkoordinasikan segala aktivitas di daerah dalam mengembangkan objek wisata. Kriteria yang digunakan untuk menganalisis peran sebagai koordinator adalah menetapkan kebijakan pada bidang pariwisata dan sebagai pelaksana manajerial.

b. Peran sebagai fasilitator

Yang dimaksud dengan peran ini yaitu mewujudkan keadaan yang menguntungkan kepada penyelenggara pembangunan atau menjadi penengah atas kepentingan pihak yang bersangkutan untuk memaksimalkan kegiatan

dalam membangun daerah. Peran ini dapat dilaksanakan dengan adanya pemberian pelatihan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Menurut Pitana dan Gayatri (2005) peran fasilitator adalah peran dengan menyediakan fasilitas pendukung dalam mengelola peningkatan potensi wisata yang terdapat di daerah tersebut. Fasilitas yang disediakan tersebut juga berguna untuk merealisasikan program pemerintah daerah dan semakin cepatnya pembangunan dengan memperbaiki lingkungan daerahnya.

Menurut Isnawati dan Zulkarnaini (2022) dalam jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir” menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi masyarakat agar pengelolaan pariwisata didasarkan pada kebutuhan dan dilakukan secara bersama-sama. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa sebagai fasilitator pemerintah daerah dapat melakukan beberapa tindakan untuk merealisasikan perannya dengan cara sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana dan prasarana, pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan aktivitas atau agenda dalam pariwisata. Peran ini dilakukan melalui pemberian dukungan dan anggaran dana dalam kegiatan operasional masyarakat untuk mengembangkan dan memelihara objek wisata.

2. Memfasilitasi aktivitas masyarakat, pemerintah daerah memberikan arahan mengenai pelaksanaan teknis, strategi dan juga program yang memiliki manfaat dalam mengembangkan wisata. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya dalam pengembangan objek melalui adanya pelatihan, pendidikan, dan peningkatan ketampilan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini definisi peran sebagai fasilitator merupakan peran yang dilakukan pemerintah dalam memberikan fasilitas yang mendukung pengembangan objek wisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksana pariwisata. Selanjutnya, kriteria yang digunakan adalah penyedia sarana dan prasarana pariwisata dan memfasilitasi aktivitas masyarakat.

c. Peran sebagai stimulator

Menurut Blakely, definisi peran sebagai stimulator yaitu pemerintah mampu menciptakan strategi dalam pembangunan objek dan daya tarik wisata. Pemerintah daerah membuat strategi untuk dilakukan sebagai langkah untuk mengembangkan objek wisata. Menurut Arifin (2017), peran pemerintah sebagai stimulator adalah pemerintah wajib menstimulasi kerjasama agar tetap terjaga dan juga stimulasi dalam pengadaan kegiatan yang berdampak pada kuantitas pengunjung.

Menurut Nugraha dan Enga (2021) dalam jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Studi Kasus di

Pantai Oetune, Kabupaten Timor Tengah Selatan” mengemukakan bahwa dengan peran stimulator dapat dilakukan dengan melibatkan dan bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membangun sarana supaya memberikan manfaat kepada pemerintah, masyarakat dan juga pengunjung. Kerja sama dapat dilakukan bersama dengan pemerintah, masyarakat maupun swasta. Adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan sektor lain menjadi salah satu strategi untuk mengembangkan objek wisata dalam hal penggalangan dana. Artinya, dari kerja sama yang dilakukan dapat memudahkan pemerintah untuk mengumpulkan dana dalam mengembangkan objek wisata.

Menurut Hidayat, dkk (2021) dalam jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Daerah” menjelaskan bahwa peran stimulator adalah peran yang dilaksanakan melalui adanya tindakan yang spesial kepada lingkungan bisnis sebagai langkah untuk memberikan pengaruh terhadap pengusaha supaya terus terkenal di lokasi tersebut. Peran ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat. Sejalan dengan tindakan tersebut, bahwa menurut Khasanah (2022) menjelaskan bahwa bantuan dana yang diberikan pemerintah daerah dapat berupa bantuan fisik. Bantuan dana yang diberikan berguna untuk mengembangkan objek wisata baik untuk mendukung kegiatan masyarakat ataupun untuk mengembangkan potensi wisata.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa peran sebagai stimulator adalah peran pemerintah dalam menstimulasi penciptaan

tindakan dan strategi untuk membangun objek wisata agar perusahaan tertarik untuk masuk ke objek wisata dan perusahaan yang ada tetap bertahan. Dalam penelitian ini kriteria peran sebagai stimulator yang digunakan adalah berkerja sama dengan berbagai sektor dan pemberian bantuan dana.

d. Peran sebagai motivator

Peran sebagai motivator dibutuhkan guna menjaga berjalannya kegiatan usaha dalam pariwisata. Dalam hal ini targetnya adalah para investor, masyarakat dan juga pebisnis. Pendapat lain dari Pitana dan Gayatri (2005) menambahkan bahwa pemerintah berperan menjadi motivator didukung oleh adanya kedudukan dan status yang memiliki kekuasaan sehingga peran tersebut berperan penting terhadap pihak yang berkepentingan. Menurut Sardiman (2007), motivator atau motivasi memberikan dorongan kepada manusia dalam melaksanakan sesuatu atau bertindak.

Peran sebagai motivator oleh pemerintah daerah digunakan untuk memberikan semangat kepada masyarakat supaya ikut menggerakkan dan membuat objek wisata daerah semakin berkembang. Motivasi penting diberikan kepada pihak yang berkaitan dengan objek wisata karena masyarakat perlu diberikan dorongan agar masyarakat memahami arah dari pembangunan dan pengembangan wisata.

Menurut Pramesti dan Indartuti (2022) dalam jurnal yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu Desa

Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik” mengemukakan bahwa peran ini dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi kepada berbagai sektor mengenai potensi objek wisata. Tindakan ini menjadi wujud memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai objek wisata yang dikembangkan berdampak pada pendapatan masyarakat yang meningkat.

Anggraeni dan Fadlurrahman (2021) dalam jurnal yang berjudul “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung dalam Pengembangan Objek Wisata” mengemukakan pendapat bahwa sosialisasi menjadi salah satu tindakan motivator dalam pengembangan objek wisata. Sosialisasi merupakan tahapan menanamkan atau membagikan kebiasaan atau nilai dan peraturan yang berlangsung secara berkesinambungan dalam masyarakat. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah langkah untuk memberikan binaan dan motivasi kepada masyarakat supaya daerahnya dapat dijadikan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Pelaksanaan sosialisasi oleh pemerintah adalah cara dalam memberikan motivasi kepada pihak yang bersangkutan dalam mengembangkan objek wisata. Hal tersebut terjadi agar pihak-pihak tersebut memiliki pemahaman dalam melayani pengunjung, manajemen keuangan atau untuk aktivitas lain yang berhubungan dengan usaha dalam mengembangkan objek wisata.

Menurut Isnawati dan Zulkarnaini (2022) dalam jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”

menyatakan pendapatnya bahwa peran motivator dapat dilakukan dengan melakukan promosi wisata yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan objek wisata kepada, masyarakat baik di nusantara maupun mancanegara. Tindakan ini dilakukan dalam rangka membuat pengunjung untuk tertarik melakukan wisata ke tempat wisata tertentu. Promosi diartikan sebagai aktivitas komunikasi yang bermanfaat dalam penyebaran informasi, pemberian pengaruh, dan pengingat target agar setia terhadap produk yang ditawarkan (Tjiptono dalam Mayasari, 2014).

Menurut Sunaryo (dalam Herat dkk., 2015), pada prinsipnya promosi kepariwisataan adalah aktivitas dalam komunikasi oleh pelaksana pariwisata sebagai upaya dalam memberikan pengaruh kepada publik sebagai pasar pengunjung yang menjadi sasaran untuk membeli produknya. Artinya, promosi sangat membutuhkan komunikasi kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Menurut Anggraeni & Fadlurrahman (2018), idealnya aktivitas promosi dilaksanakan secara berkelanjutan dengan beragam media yang dinilai efektif untuk menggapai pasar yaitu cetak maupun elektronik. Contoh media cetak adalah brosur, spanduk, leaflet, dan lain sebagainya. Sedangkan, media elektronik yaitu melalui televisi, radio, internet dan lain sebagainya. Soekadijo (dalam Mayasari, 2014) berpendapat bahwa terdapat 2 macam kegiatan promosi yaitu secara langsung dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan pemasaran dan secara tidak langsung dilaksanakan oleh penyalur hasil karya wisata, contohnya adalah agen perjalanan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan peran sebagai motivator dalam penelitian ini adalah peran pemerintah dalam memotivasi pelaku pengembangan objek wisata agar usaha pariwisata terus berjalan. Kriteria yang digunakan adalah melakukan sosialisasi dan melakukan promosi wisata.

1.5.7 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pada Peran dalam Pengembangan Objek Wisata

Dalam penelitian Destiana, dkk (2020) menjelaskan mengenai 4 unsur yang berhubungan dengan faktor yang mendukung dan menghambat peran stakeholders yaitu:

1. Nilai

Dalam KBBI dimuat mengenai definisi nilai adalah harga sesuatu, angka kedalaman, kadar mutu, dan banyak sedikitnya isi. Nilai dapat dijadikan sebagai sebuah prinsip atau standar terhadap kualitas yang dianggap berharga. Menurut Schwartz dalam (Dahriyanto, 2018) nilai adalah sasaean yang hendak dicapai oleh seseorang melalui level kepentingan yang beragam dan sebagai prinsip dalam kehidupan. Melalui nilai tersebut para pemangku kepentingan melakukan perannya dalam bekerja. Analisis peran stakeholders memiliki beberapa nilai seperti: nilai individual, organisasi, legalitas, dan profesionalitas.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yang berisi langkah dan merupakan kerangka kerja mengenai apa yang harus dilakukan (Keban, 2014). Dalam buku yang berjudul “Dictionary of Education” oleh Carter Victor Good tahun 1959, memuat definisi kebijakan yaitu suatu pertimbangan yang didasarkan terhadap faktor yang sifatnya sesuai dengan situasi, umum dan berisi arahan agar tujuan dapat dicapai. Menurut James E Anderson dalam Islamy (2009: 17) menjelaskan bahwa definisi kebijakan yaitu sekumpulan perbuatan dengan maksud tertentu kemudian dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, pemerintah perlu membuat kebijakan sebagai landasan dalam pengembangan objek wisata.

3. Komunikasi

Hubungan antar stakeholders dapat berjalan secara efektif karena didukung oleh komunikasi yang baik (Destiana, 2020). Harold Lasswell menyebutkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yaitu: pengirim pesan, pesan, media, penerima pesan, dan efek atau umpan balik. Berdasarkan unsur tersebut, komunikasi didefinisikan sebagai metode menyampaikan pesan oleh pengirim pesan dengan media tertentu kepada penerima pesan. Komunikasi yang efektif di mana stakeholders secara aktif terlibat, dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dan mengatasi konflik, serta dapat membentuk hubungan yang baik.

4. Kepercayaan

Menurut Colquitt, LePine dan Wesson (dalam Qomariah, 2014) kepercayaan adalah adanya rasa ingin bergantung terhadap kekuasaan yang dilandaskan atas harapan yang positif mengenai perbuatan dan kepedulian penguasa. Kemudian George dan Jones (dalam Qomariah, 2014) juga menyebutkan bahwa kepercayaan merupakan pernyataan keseriusan atau keteguhan kepada manusia lain ataupun kumpulan, sehingga resiko atas adanya kehancuran oleh pihak lain atas perbuatannya menjadi tidak ada. Namun, hubungan yang terjalin antar stakeholders mempunyai peluang munculnya rasa ketidakpercayaan stakeholders. Hal tersebut dapat muncul karena kurangnya koordinasi dan sinergi, serta arahan dari sektor utama dalam melakukan peran untuk pengembangan objek wisata. Kepercayaan diperlukan sebagai dasar untuk menjalin hubungan kerja atau sosial dalam kehidupan sehari-hari.

1.5.8 Pengembangan Objek Wisata

Barreto dan Giantari (2015:34) mendefenisikan pengembangan pariwisata adalah upaya dalam pengembangan dan memberikan kemajuan terhadap objek wisata supaya objek wisatanya semakin membaik dan memiliki daya tarik untuk kemudian memikat wisatawan untuk berwisata di tempat tersebut. Pengembangan adalah tahapan, metode ataupun perbuatan membuat sesuatu menjadi semakin baik, progresif, bermanfaat dan sempurna. (Alwi Hasan dkk, 2005:269). Pengembangan kepariwisataan dilakukan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata

dijelaskan pembangunan objek dan daya tarik wisata dilaksanakan melalui adanya perusahaan, pengelolaan, dan pembuatan terhadap objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata

Menurut Chafid Fandeli (2000: 58), objek wisata adalah bentuk dari bentukan makhluk hidup, cara hidup, kebudayaan, dan lokasi yang berdaya tarik. Pengelompokan jenis objek wisata dapat dilihat dari ciri khas yang ditampilkan oleh masing-masing objek wisata. Sehubungan dengan pendapat tersebut, Mappi (2001:30-33) menjelaskan bahwa objek wisata digolongkan menjadi 3 yaitu:

1. Alam, misalnya: laut, pantai, dan sebagainya.
2. Budaya, contohnya: upacara kelahiran, cagar budaya, bangunan bersejarah, museum dan sebagainya.
3. Buatan, contohnya: fasilitas olahraga, permainan dan lain-lain.

Dalam hal ini, pengembangan wisata di objek wisata Kota Lama Semarang dengan keindahan buatan berupa wisata budaya yang ditunjukkan oleh gedung-gedung bersejarah peninggalan dari masa penjajahan.

1.6 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian dalam penelitian ini mengarah kepada peran pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang di Kota Lama Semarang. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang dilakukan berdasarkan Perda Kota Semarang

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kepariwisata yang mencantumkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengaturan dan pengelolaan kegiatan kepariwisataan adalah hak dari pemerintah daerah. Melalui peraturan tersebut dapat diketahui bahwa adanya hak untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan pemerintah daerah menyebabkan pemerintah memiliki peran sebagai wujud dari pelaksanaan hak atas kedudukan yang dimiliki sebagai pemerintah daerah.

Dalam urusan kepariwisataan, pengembangan objek wisata adalah hal yang berguna untuk dilaksanakan karena melalui pengembangan tersebut mutu objek wisata dan kuantitas pengunjung yang berkunjung ke tempat wisata tersebut dapat semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mengembangkan objek wisata agar tujuan pengembangan wisata dapat dicapai dan peran pemerintah dalam pariwisata dapat direalisasikan. Dalam pengembangan objek wisata terdapat peran pemerintah daerah adalah suatu fenomena penelitian yang perlu untuk dikaji dan diteliti.

Fenomena penelitian peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPSKL) Semarang dalam pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang di Kota Lama Semarang mengacu pada karakteristik peran sebagai berikut:

Tabel 1.4 Fenomena Penelitian

a. Peran

No	Fenomena	Sub Fenomena	Bagian Sub Fenomena
1.	Koordinator	Menetapkan kebijakan dalam bidang pariwisata	1. Contoh kebijakan yang ditetapkan dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang 2. Tindakan yang dilakukan dalam menetapkan kebijakan bidang pariwisata untuk mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang 3. Cara yang dilakukan supaya penetapan kebijakan dalam pariwisata berjalan dengan baik
		Sebagai perencana dan pelaksana manajerial	1. Tindakan yang dilakukan dalam melakukan koordinasi untuk segala aktivitas pariwisata di Kota Lama Semarang 2. Apa saja perencanaan yang dilakukan dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang 3. Cara yang dilakukan agar perencanaan perubahan untuk mengembangkan objek Wisata Kota Lama Semarang dapat diterima oleh setiap sektor yang bersangkutan?
2.	Fasilitator	Penyedia sarana dan prasarana pariwisata	1. Sarana dan prasarana yang disediakan dalam mengembangkan objek wisata di Kota Lama Semarang 2. Tindakan yang dilakukan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang 3. Syarat yang harus dipenuhi dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang 4. Cara yang dilakukan agar penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan objek wisata Kota Lama

			Semarang terpenuhi secara merata dan berkualitas
		Memfasilitasi aktivitas masyarakat	1. Tindakan yang dilakukan dalam memfasilitasi aktivitas masyarakat 2. Program yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi aktivitas masyarakat untuk pengembangan objek wisata 3. Cara yang dilakukan agar aktivitas masyarakat terlaksana sesuai dengan fasilitas atau program yang diberikan
3.	Stimulator	Kerja sama dengan berbagai sektor	1. Dengan siapa saja kerja sama dilakukan dan bentuk kerja sama yang dilakukan dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang 2. Alasan kerja sama dengan berbagai sektor dilakukan dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang 3. Tindakan yang dilakukan dalam menjalin kerja sama dengan berbagai sektor untuk pengembangan objek wisata Kota Lama Semarang 4. Bagaimana cara agar kerja sama dengan berbagai sektor berguna dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang

		Pemberian bantuan dana	1. Bantuan dana yang dilakukan dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang 2. Tindakan yang dilakukan dalam memberikan bantuan dana untuk mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang 3. Ketentuan atau syarat yang ditetapkan dalam memberikan bantuan dana untuk mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang 4. Cara yang dilakukan supaya pemberian bantuan dana dalam mengembangkan objek wisata terlaksana secara merata dan tepat sasaran
4.	Motivator	Melakukan sosialisasi	1. Program sosialisasi yang dilakukan dalam mengembangkan objek wisata 2. Tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang 3. Cara yang dilakukan agar pelaksanaan sosialisasi berguna dan berdampak baik dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang
		Melakukan promosi wisata	1. Tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan promosi wisata dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang 2. Media yang digunakan dalam melakukan promosi wisata dan apa contoh promosi wisata yang telah dilakukan 3. Cara yang dilakukan supaya pelaksanaan promosi wisata berjalan dengan baik untuk mengembangkan objek wisata Kota Lama Semarang

b. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Fenomena	Sub Fenomena	Pertanyaan
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	Nilai	Penerapan nilai-nilai terhadap peran dalam pengembangan wisata Kota Lama Semarang
	Kebijakan	BPSKL berperan sesuai dengan kebijakan dalam pengembangan wisata Kota Lama Semarang
	Kepercayaan	Pengaruh kepercayaan antar aktor dalam pengembangan wisata Kota Lama Semarang?
	Komunikasi	Komunikasi yang dibangun antar aktor dalam pengembangan wisata Kota Lama Semarang?

Sumber: Diolah peneliti

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Menurut Pasolong dalam Metode Penelitian Administrasi Publik (2012:75) ada beberapa tipe penelitian diantaranya, deskriptif, eksploratif dan explanatory. Dijelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan memberikan gambaran mengenai keadaan yang terjadi dan penggambaran terhadap kondisi yang terjadi selama penelitian berlangsung. Tipe ini dilakukan melalui penggambaran, pembuatan catatan, analisis, dan interpretasi ke dalam fakta yang terjadi. Penelitian ini tidak menguji hipotesa tetapi mendeskripsikannya menjadi informasi yang dinilai secara objektif. Penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian

mendapatkan data yang deskriptif yaitu bentuk tulisan dan lisan. Data didasarkan pada informasi yang didapatkan dari pihak yang diteliti. Tipe penelitian ini menjadi pilihan peneliti karena peneliti ingin untuk melakukan analisa dan juga deskripsi terhadap permasalahan peran BPSKL Semarang dalam pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang

1.7.2 Situs Penelitian

Wiratna Sujarwene (2014:7, situs penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Situs tersebut menjadi sumber untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Situs penelitian yang dipilih adalah di lembaga pemerintah yaitu Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu ataupun sekelompok orang yang diminta untuk memberikan keterangan mengenai kenyataan atau pendapat secara pribadi. Dalam melakukan penelitian, menentukan subjek wajib berhubungan dengan topic persoalan yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah permasalahan peran Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) Semarang dalam pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang. Peneliti membutuhkan beberapa informan sehingga melibatkan semua orang yang berperan dalam pengembangan objek wisata budaya Kota Lama Semarang, yaitu Sekretaris Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) Semarang, Unit

Umum BPSKL Semarang, Unit Perencana BPSKL Semarang, anggota BPSKL dan masyarakat di Kota Lama Semarang.

1.7.4 Jenis Data dan Sumber Data

Menurut Wiratna Sujarweni (2014: 89-94), ada 2 golongan data dalam penelitian yaitu data kualitatif (berwujud kata atau kalimat) dan data kuantitatif (berwujud angka). Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, karena data penelitian ini merupakan data yang berisi informasi berupa kata atau kalimat dari narasumber.

Defenisi sumber data dari Sugiyono (2009:137) adalah seluruh hal yang dianggap ada nilai informatifnya terhadap data dalam pelaksanaan penelitian. Terdapat 2 kelompok data berdasarkan sumbernya dan penelitian ini menggunakan keduanya. Sumber tersebut yaitu

- a. Data primer adalah data yang perolehannya secara langsung dari sumber data di situs penelitian.
- b. Data sekunder adalah suatu sumber data didapatkan melalui perantara, contohnya adalah artikel, jurnal, buku serta situs di internet.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam peneliitan ini adalah:

1. Teknik Wawancara Mendalam

Menurut Surtopo (2006: 72), wawancara mendalam merupakan tahapan mendapatkan informasi dalam mencapai tujuan dari penelitian melalui

adanya tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber dan dapat dilakukan melalui ada atau tidaknya pedoman wawancara. Menurut Moleong (2005: 186), wawancara mendalam adalah kegiatan mendapatkan informasi yang lebih mendalam, transparan, bebas dengan masalah, berfokus pada penelitian dan menagarah pada pusat penelitian. Yang diwawancarai adalah Sekretaris Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) Semarang, Unit Umum BPSKL Semarang, Unit Perencana BPSKL Semarang, anggota BPSKL dan masyarakat di Kota Lama Semarang.

2. Teknik Observasi

Pasolong (2012) mengungkapkan definisi observasi adalah aktivitas yang dilaksanakan melalui kegiatan mengamati secara langsung dan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Menurut Herdiansyah (2010), observasi merupakan kegiatan dengan melakukan penglihatan, pencermatan, pengamatan serta perekaman tingkah laku dengan terstruktur terhadap suatu capaian yang ditentukan. Dalam penelitian ini dilakukan observasi di Kota Lama Semarang untuk mengamati aktivitas dan keadaan yang terjadi di lokasi tersebut.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen adalah serangkaian peristiwa yang terjadi kemudian dicatat, direkam dan digambar. Teknik ini menjadi pelengkap dari kegiatan observasi dan wawancara di lapangan mengenai permasalahan yang dikaji. Yang

dilakukan adalah dengan mengumpulkan dokumentasi dari kegiatan observasi dan wawancara.

4. Studi Kepustakaan

Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dengan adanya kajian teoritis dan referensi yang berhubungan dengan nilai, budaya dan norma pada keadaan sosial. Adapun data yang diperoleh bersumber dari jurnal, buku, dokumen organisasi, dan artikel ilmiah. Dalam penelitian ini data diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah dan dokumen dari organisasi yang berkaitan dengan peran Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah kegiatan pencarian dan menyusun data dengan terstruktur baik data wawancara, catatan dari lokasi maupun data lainnya supaya mudah dimengerti. Menurut Susan Stainback, analisis data adalah sesuatu yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, kegiatan dalam analisis data kualitatif dilaksanakan dengan timbal balik dan berkelanjutan sampai selesai dan datanya jenuh. Terdapat 3 tahapan dalam analisis data yaitu

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan dengan menyederhanakan data dan menentukan hal inti sesuai fokus penelitian. Reduksi data membutuhkan kecerdasan, keleluasaan dan wawasan yang mendalam dan tinggi. Artinya, reduksi data adalah kegiatan membuat rangkuman, pemilahan hal penting dalam penelitian dan membuang hal yang tidak berguna.

2. Penyajian Data

Selanjutnya, yaitu adalah mendisplay data yang, merupakan proses dengan mengorganisasikan data sehingga data dapat dianalisis dan disimpulkan dengan mudah. Tahap ini membuat data menjadi lebih terorganisir dan tersusun sehingga dapat dimengerti dengan mudah. Teks yang sifatnya naratif merupakan bentuk penyajian data yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diharapkan adalah kesimpulan yang berisi temuan baru berbeda dengan yang sebelumnya. Hasil analisis dan interpretasi data dipakai dalam penarikan kesimpulan sebagai langkah untuk memberikan jawaban atas masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian dan hipotesis yang diajukan.

Hasil analisa data tersebut selanjutnya, diinterpretasikan sehingga data-data tersebut menjadi sumber informasi yang berguna bagi peneliti. Pada penelitian deskriptif, interpretasi merupakan cara dalam memberikan penjelasan atas fenomena penelitian dengan lebih mendalam sesuai dengan data dan informasi yang didapatkan.

Adapun indikator yang digunakan dalam menarik kesimpulan mengenai baik/tidaknya peran BSPKL dalam pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang adalah

Tabel 1.5 Indikator Penarikan Kesimpulan

Nomor	Kriteria	Indikator
1.	Baik	Terdapat tindakan yang relevan dengan peran BSPKL
2.	Kurang baik	Tidak terdapat tindakan yang relevan dengan peran BSPKL

Sumber: Diolah Peneliti

1.7.7 Kualitas Data

Pelaksanaan dalam penelitian dengan tipe kualitatif wajib disesuaikan dengan kredibilitas karena dengan penyesuaian maka, keabsahan data dan kepercayaan hasil penelitian mempunyai level yang tinggi yaitu sesuai dengan fakta di lapangan. Triangulasi yaitu cara yang dilakukan ketika melakukan pemeriksaan terhadap nilai keabsahan dari data yang diperoleh. Menurut

Sugiyono (2015:83), definisi triangulasi data yaitu teknik pengumpulan data melalui adanya penggabungan beragam sumber data yang tersedia.

Wijaya (2018:120-121) mengemukakan mengenai triangulasi data merupakan teknik dengan melakukan pemeriksaan data dari beragam sumber, cara dan waktu. Hal ini mencakup tiga jenis triangulasi:.

1. Triangulasi Sumber adalah pengujian kredibilitas data melalui adanya pengecekan data dari beragam sumber, seperti wawancara, jurnal, dan dokumen lainnya.
2. Triangulasi Teknik adalah pengujian kredibilitas data melalui pemakaian teknik yang beragam terhadap sumber yang sama, contohnya, data yang dihasilkan dengan wawancara diperiksa ulang dengan observasi.
3. Triangulasi Waktu adalah pemastian kredibilitas data melalui adanya pemeriksaan pada waktu/ situasi yang berbeda-beda.

Teknik triangulasi sumber adalah teknik uji kredibilitas data yang digunakan oleh peneliti. Uji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data dari beragam sumber yaitu wawancara, jurnal, dan situs internet serta dokumen-dokumen yang berkaitan tentang peran dalam pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang.